

ABSTRAKSI

Notaris dalam menjalankan jabatan dan tugasnya sebagai pejabat umum harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap negara dan masyarakat meskipun notaris bukanlah Pegawai Negeri yang juga harus diawasi agar tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugas jabatannya seorang notaris untuk membuat alat bukti yang berupa akta otentik, banyak terjadi hal yang karena ketidaksengajaannya atau karena kurang menguasainya maka dapat terjadi tindakan malpraktek. Oleh karena itu notaris harus berada dalam pengawasan suatu lembaga yang independen dan netral yaitu Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dan kode etik. Tapi ada lembaga lain seperti Ombudsman yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap notaris yang melakukan malpraktek dan pelanggaran kode etik profesi.

Metode penulisan yang digunakan dalam pembuatan tesis ini adalah sistem case study atau studi kasus, dengan menggunakan bentuk pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dalam pembahasan permasalahannya. Pokok permasalahan yang dibahas mengenai apakah notaris yang melakukan malpraktek dapat dijatuhkan sanksi oleh Ombudsman serta siapakah yang berwenang memberikan sanksi terhadap notaris yang melakukan tindakan malpraktek, pelanggaran etika, dan pelanggaran UUJN.

Berdasarkan pembahasan, dapat diketahui bahwa notaris yang melakukan malpraktek tidak dapat dijatuhkan sanksi oleh Ombudsman serta pihak yang memberi sanksi kepada notaris yang melakukan malpraktek dan pelanggaran kode etik profesi adalah Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris.

Kata kunci: Ombudsman, Notaris, Malpraktek